

# **STRATEGI KOMUNIKASI PARTISIPATIF DALAM MERANCANG MUSYAWARAH RENCANA AKSI (MUSRENA) BAGI PEMBERDAYAAN BURUH MIGRAN PEREMPUAN DI KABUPATEN CILACAP JAWA TENGAH**

**Toto Sugito, Sri Pangestuti, Hikmah Nuraini, Adhi Iman Sulaiman**  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Kampus Grendeng No. 1 Purwokerto  
adhi\_iman@yahoo.com

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk membuat strategi komunikasi partisipatif dalam merancang Musyawarah Rencana Aksi (Musrena) bagi pemberdayaan buruh migran perempuan di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Metode yang dipergunakan adalah *Participatory Rural Appraisal* (PRA) sebagai metoda riset yang melibatkan peran dan potensi masyarakat secara penuh untuk mengidentifikasi dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi selama ini, serta menentukan kebutuhan yang harus diwujudkan masyarakat sendiri. Pengumpulan data dengan *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan penelitian dengan menggunakan purposif yang dipilih dari para mantan dan calon buruh migran perempuan di Desa Sidaurip sebagai desa terbanyak buruh migran perempuan di Provinsi Jawa Tengah. Analisis data menggunakan Analisis SWOT untuk melakukan proses identifikasi masalah, potensi, dampak dan hasil. Hasil penelitian menunjukkan strategi komunikasi partisipatif dalam konsep Musrena bagi buruh migran sebagai media komunikasi untuk merumuskan dan menghasilkan program pemberdayaan yang akan diaspirasikan serta diperjuangkan dalam proses Musrenbang di tingkat Desa. Proses strategi komunikasi partisipatif melalui: (1) Pemantapan hubungan; (2) Bekerjasama dengan masyarakat; (3) Identifikasi keragaman masyarakat; (4) Identifikasi kebutuhan komunikasi.

**Kata kunci:** Komunikasi Partisipatif; pemberdayaan; buruh migran

## **Abstract**

*This research aim to create a participatory communication strategy in designing Deliberation the Action Plan (Musrena) for the empowerment of women migrant workers in Cilacap regency, Central Java. The method used participatory rural appraisal (PRA) as a method of research that involved the role and potential of the community to identify and find solutions to problems encountered during this time, and to determine the needs of the people themselves that must be realized. Data collection with the Focus Group Discussion (FGD), interviews, observation, and documentation. Determination of research informants were selected using purposive of the former and prospective women migrant workers in the village as a Sidaurip village most women migrant workers in the province of Central Java. Data were analyzed using SWOT Analysis to the process of identifying the problem, potential, impact and results. The results showed the concept of participatory communication strategy Musrena for migrant workers as a medium of communication for the formulation and development program that would generate aspirated and fought in planning forums at the village level. The process of participatory communication strategy through: (1) Stabilization of the relationship; (2) In cooperation with the public; (3) Identification of the diversity of the community; (4) Identification of communication needs.*

**Keywords:** Participatory Communication; empowerment; migrant workers

Ada sebuah idiom “pahlawan devisa” yang sering muncul ketika fenomena tentang buruh migran atau lebih di kenal dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), namun selalu saja terpublikasikan problematikanya dibandingkan dengan kisah positifnya, khususnya pada buruh migran perempuan mulai dari proses keberangkatan, ketika bekerja dan setelah pulang bekerja ke tempat asal. Banyaknya kasus buruh migran mulai dari tuduhan dan hukuman berat atas pencurian dan pembunuhan, kemudian mendapat perlakuan kekerasan fisik, mental, termasuk seksual, terutama yang dialami oleh buruh migran perempuan atau Tenaga Kerja Wanita (TKW). Sebagaimana catatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), selama 2012 sedikitnya ada 6.364 kasus TKI bermasalah, data dari Migran CARE ada 420 buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri (sumber: <http://www.dpr.go.id>). Menurut Wulan (2010 : iv) bahwa Buruh Migran Perempuan (BMP) sering mengalami ketidakadilan mulai dari sebelum berangkat, di tempat kerja dan sampai kepulangannya kembali ke daerah asal. Padahal menjadi BMP sebagai upaya memenuhi kebutuhan keluarga (mencari nafkah) dan sebenarnya memberikan kontribusi bagi devisa negara dan remiten bagi daerahnya.

Sisi lain tetapi tetap saja, menjadi buruh migran bagi masyarakat tertentu menjadi tawaran profesi yang menjanjikan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya, sekalipun sudah banyak permasalahan.

Kemudian tidak bisa dipungkiri buruh migran juga secara signifikan menghasilkan sumber pendapatan bagi devisa negara dan pendapatan asli daerah, sehingga membantu perkembangan pembangunan di daerah serta bagi keluarganya Berdasarkan data remitan di Kabupaten Cilacap sebagai daerah buruh migran terbanyak di Jawa Tengah yaitu statistik kiriman uang (remitansi) buruh migran asal Cilacap, Jawa Tengah terus naik dari tahun ke tahun.

Hal ini bisa menjadi bukti bahwa warga Cilacap telah banyak yang menjadi buruh migran. Pada tahun 2008, tercatat remitansi berjumlah Rp 324 milyar per tahun, tahun 2009 menjadi Rp 370 milyar, memasuki tahun 2010 jumlahnya bertambah menjadi Rp 570 milyar dan puncaknya di tahun 2011 besaran remitansi mencapai Rp 700 milyar lebih, telah menyentuh angka separuh lebih dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Cilacap. Maka melihat remitansi tersebut seharusnya seluruh *stakeholder* baik dari kalangan tokoh masyarakat hingga pemerintah, menganggap buruh migran sebagai sektor penting yang harus diperhatikan (sumber : [www.buruhmigran.or.id](http://www.buruhmigran.or.id)).

Maka sudah seharusnya buruh migran menjadi perhatian yang lebih serius dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti pemerintah, wakil rakyat, pihak swasta, dan lembaga-lembaga di *civil society* mulai tingkat pusat sampai tingkat lokal (desa) termasuk akademisi atau perguruan tinggi. Hal ini ditegaskan

dalam salah satu rekomendasi hasil penelitian Subianto (2006 : 156), diperlukan campur tangan pemerintah terutama dalam menumbuhkan *enterpreneurship* agar pemanfaatan pendapatan dari buruh migran yang dikirimkan ke desa selama pelaku mobilitas tidak berada di desa (remitan) dapat digunakan untuk kegiatan produktif dan investasi, bukan konsumtif semata.

Meskipun telah ada kebijakan pusat untuk memberikan perlindungan kepada buruh migran (TKI), namun dalam pelaksanaannya di daerah, belum banyak didukung oleh kebijakan lokal yang dapat dijadikan pijakan bagi program dan kegiatan yang bersifat lokal. maka memerlukan peran aktif pemerintah khususnya untuk membuat program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, memberikan layanan informasi, memberikan layanan sosial, dan memberikan perlindungan sosial kepada mereka dan keluarga yang berada di daerah asal (Sutaat *et al.* 2011 : 98).

Perihal perhatian pemerintah terhadap buruh migran, di Kabupaten Cilacap menurut Libanun Muzayyin sebagai Ketua Badan Legislatif Daerah (Balegda) DPRD Cilacap, dalam Workshop Jaringan Kepala Desa yang membahas komitmen pemerintah desa dalam memberikan buruh migran dan keluarganya di daerah asal, sehingga Kabupaten Cilacap dengan jumlah buruh migran terbanyak di Jawa Tengah dan salah satu yang terbesar di Indonesia, semestinya memang memiliki Perda khusus yang mengatur perlindungan dan pengelolaan buruh migran (sumber :

<http://polhukam.rmol.co/read>).

Merancang dan menghasilkan pedoman Musrena bagi buruh migran perempuan terinspirasi dari hasil penelitiannya Nursiti dan Susana (2012 :68) tentang konsep Musrena sebagai kegiatan sejenis Musrenbang tapi khusus untuk perempuan. Musrena adalah kegiatan khas yang diperkenalkan oleh Kota Banda Aceh untuk memastikan perempuan dapat menyampaikan aspirasinya tanpa hambatan apapun. Saat ini, sejumlah kota/kabupaten di Aceh dan wilayah lain di Indonesia juga melakukan hal serupa setelah belajar dari pelaksanaan Musrena di Banda Aceh.

Berkat program andalan Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (Musrena) Kota Banda Aceh mendapat *Innovative Government Award* 2012 untuk kategori tata kelola pemerintahan dari Kementerian Dalam Negeri (sumber : <http://www.harianterbit.com>).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti sangat tertarik untuk mengidentifikasi, menganalisis dan membuat strategi komunikasi partisipatif dalam konsep Musyawarah Rencana Aksi (Musrena) bagi pemberdayaan buruh migran perempuan di Kabupaten Cilacap. Hal ini sebagai rasa kepedulian untuk berperanserta menghasilkan solusi kongkrit bagi masalah buruh migran yaitu dengan melakukan penelitian. Hasil penelitian bisa memberikan kontribusi nyata untuk memberikan rekomendasi dan penegasan ilmiah bagi perumusan kebijakan yang dilakukan pemerintah dan wakil rakyat,

minimal untuk tingkat pemerintah lokal yaitu di lokasi desa sebagai tempat buruh migran. Kemudian dapat juga membawa manfaat untuk kajian lanjutan, program pemberdayaan dan pengabdian masyarakat bagi calon atau mantan buruh migran, serta untuk keluarganya maupun masyarakat sekitarnya di daerah asal.

Adapun lokasi penelitian yang dipilih dan ditentukan yaitu di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, sebagai salah satu daerah terdekat dengan kampus Unsoed Purwokerto, sehingga sudah seharusnya kawasan terdekat menjadi prioritas perhatian untuk kajian, pengembangan dan pengabdian akademis. Kemudian Kabupaten Cilacap sebagai daerah pengirim terbesar jumlah buruh migran di Jawa Tengah.

Menurut Kosasih sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cilacap, menyatakan bahwa Kabupaten Cilacap dikenal sebagai pengirim buruh migran terbesar di Jawa Tengah. Pada 2012, pengiriman buruh migran mencapai 5.210 orang (Sumber : <http://www.tempo.co>). Begitupun menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tahun 2011-2012, Kabupaten Cilacap menempati peringkat ketiga terbesar pengirim buruh migran Indonesia setelah Kabupaten Indramayu dan Lombok Timur (sumber : <http://www.bnp2tki.go.id>).

### **Metode Penelitian**

*Participatory Rural Appraisal* (PRA) merupakan pemahaman pedesaan

berdasarkan peranserta secara umum dengan melakukan pendekatan seleksi, identifikasi, dan kalsifikasi masalah yang ada dalam suatu wilayah pedesaan (Daniel *et al.* 2008 : 37).

Menurut Syahyuti (2006 : 145) terdapat kunci utama dalam mengimplementasikan PRA yaitu : (1) *Participation*, masukan masyarakat lokal adalah esensial dan bernilai dalam penelitian, perencanaan serta sebagai alat mendiskusikan pendekatan partisipatif dalam pembangunan; (2) *Teamwork*, dalam validitas data yang dihasilkan PRA tergantung interaksi informal dan *brainstroming* diantara yang terlibat; (3) *Fleksibilitas*, artinya tidak menyediakan suatu *blueprints* untuk pelaksanaan (*practitioners*) tapi ditentukan oleh keterampilan tim, tersedianya waktu, sumberdaya, pilihan topik dan lokasi kerja; (4) *Optimal ignorance*, supaya efisien dalam konteks anggaran dan waktu, maka harus dikumpulkan informasi yang cukup untuk pembuatan rekomendasi dan keputusan; (5) *Triangulasi*, dalam PRA bekerja dengan data kualitatif, kemudian dalam menjamin validitas, setidaknya tiga sumber atau metode harus digunakan dalam mempelajari topik yang sama.

Maka dalam penelitian ini selain metode PRA juga dilengkapi dengan metode lain seperti dalam pengumpulan data baik observasi, dokumentasi, FGD dan wawancara untuk identifikasi serta triangulasi. Kemudian metode ceramah, tanya jawab dan pelatihan untuk kegiatan sosialisasi serta simulasi.

Menggunakan purposif sampling untuk menentukan informan atau subjek penelitian yang dipilih atas pertimbangan peneliti bahwa informan atau subjek penelitian dapat berguna untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan penelitian, sebagaimana menurut Bloor dan Wood (2006 : 154) *the purposive sampling involves the selection of cases on the basis of the researcher's own judgement about which will be the most useful.*

Subjek penelitiannya atau informan di pilih 25 orang yang terdiri dari para mantan dan calon buruh migran perempuan di Desa Sidaurip sebagai desa terbanyak buruh migran perempuan di Provinsi Jawa Tengah

Lokasi penelitian pada penelitian tahun I ini difokuskan di Desa Sidaurip Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap sebagai desa terbanyak jumlah buruh migran di Jawa Tengah.

Menggunakan Analisis SWOT dipergunakan untuk melakukan proses identifikasi masalah, potensi, dampak dan hasil, yaitu: (1) faktor internal yang terdiri dari *Strenght* (kekuatan) dan *Weakness* (kelemahan). (2) faktor eksternal terdiri dari *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) (Adisasminta, 2006 : 89-90).

Kemudian dilengkapi dengan analisis data dalam desain penelitian PRA yaitu dengan: (1) Melakukan prinsip triangulasi yang digunakan baik pada metode, sumber maupun disiplin. (2) Mencari keragaman dan sekaligus perbedaan. (3) Investigasi secara langsung

dari dan dengan masyarakat lokal (Syahyuti, 2006 : 150).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pemantapan Hubungan**

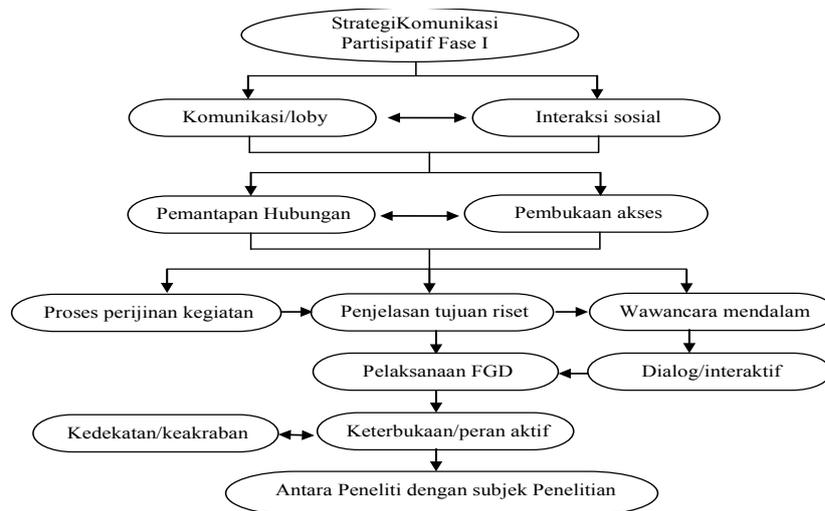
Melakukan pemantapan hubungan dilakkan melalui wawancara atau berdialog yang juga dilakukan kepada informan lain atau para peserta FGD baik sebelum, ketika diskusi dan rehat kegiatan FGD, maupun setelahnya. Hal yang paling penting disini adalah pemantapan hubungan dilakukan sebelum kegiatan FGD ketika informan mengisi daftar hadir dan angket yang berisi data identitas dan opini dari informan. Kemudian perkenalan tim peneliti dan menjelaskan tujuan kegiatan kepada para peserta ketika memulai kegiatan FGD dan menggunakan metode dialog secara partisipatif yang lebih memberikan kesempatan kepada para informan untuk menyampaikan pendapatnya serta pengalamannya.

Pemantapan hubungan dalam penelitian juga dapat dikatakan berhasil ketika peserta FGD secara aktif berdialog dengan menyampaikan pengalaman dan pendapatnya ketika pembahasan yang dipandu peneliti tentang akses informasi perburuhan, aspek partisipasi buruh migran, penilain bidang hukum yang selama ini diketahui dan dirasakan oleh buruh migran, serta bidang usaha ekonomi yang dimiliki dan diinginkan oleh buruh migran atau mantan buruh migran.

Pemantapan hubungan dapat dikatakan berhasil selain diindikasikan

dalam proses dialog pada kegiatan FGD, namun juga setelah kegiatan FGD dengan banyak yang masih bertanya atau membutuhkan penjelasan, berkenalan lebih jauh seperti bertukar nomer *handphone* (hp), menanyakan alamat dan meminta

untuk datang ke rumah informan. Intinya adda interaksi yang lebih dekat dan terbuka antara peneliti dengan subjek penelitian. Strategi komunikasi partisipatif fase I dalam gambar 1 berikut ini:



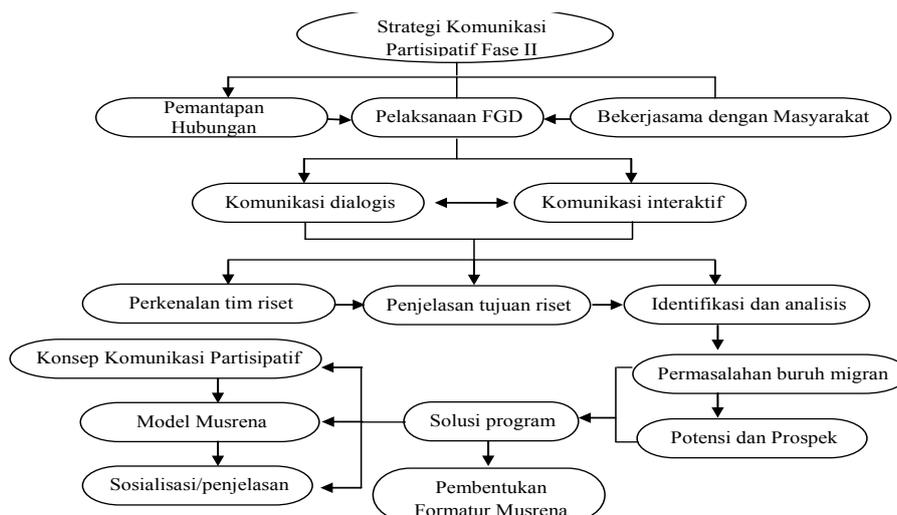
Gambar 1. Strategi Komunikasi Partisipatif Fase I

## 2. Bekerjasama dengan Masyarakat

Peserta FGD dapat berdialog dan berdiskusi mengemukakan pengalaman dan pandangannya secara terbuka mengenai akses informasi perburuhan, aspek partisipasi buruh migran, penilaian bidang hukum yang selama ini diketahui dan dirasakan oleh buruh migran, serta bidang usaha ekonomi yang dimiliki dan diinginkan oleh buruh migran atau mantan buruh migran.

Fase bekerjasama dengan masyarakat dapat dilaksanakan dan ditentukan oleh proses pemantapan hubungan atau pembukaan akses terlebih dahulu. Sehingga peserta atau subjek penelitian dapat secara terbuka dan akrab melakukan dialog dengan peneliti. Hasilnya akhirnya dapat menyadari pentingnya

Musyawarah Rencana Aksi (Musrena) bagi perempuan buruh migran dalam mengaspirasikan dan terlibat merencanakan/ membuat program pembangunan. Fase bekerjasama bukan hanya antara peneliti dengan subjek penelitian, namun ada kerjasama antar subjek penelitian untuk sama-sama mengikuti kegiatan FGD dalam mengidentifikasi dan menganalisis masalah, potensi serta prospek tentang buruh migran. Wujud kerjasama antar peneliti dengan subjek penelitian adalah berhasil menghasilkan format atau susunan pengurus Musrena buruh migran perempuan. Adapun strategi komunikasi partisipatif buruh migran perempuan fase II tentang bekerjasama dengan masyarakat adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Strategi Komunikasi Partisipatif Fase II

### 3. Identifikasi Keragaman Masyarakat

Analisis keragaman masyarakat berdasarkan hasil kuesioner yang di

triangulasi dan diferivikasi dalam FGD melalui dialog interaktif adalah sebagai berikut:

Partisipasi Buruh Migran Perempuan dalam Musrenbangdes		
Faktor Internal		
No	Kekuatan ( <i>Strength</i> )	Kelemahan ( <i>Weakness</i> )
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perempuan mendapat porsi sebagai peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat desa (Musrenbangdes)</li> <li>✓ Ada semangat dari mantan buruh migran perempuan untuk berpartisipasi dalam Musrenbangdes</li> <li>✓ Mantan buruh migran perempuan masih dalam katagori usia produktif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Buruh miran perempuan masih banyak yang belum mengetahui tentang Musrenbangdes.</li> <li>▪ Musrenbangdes hanya melibatkan perempuan dari pengurus PKK.</li> <li>▪ Keterwakilan perempuan yaitu dari PKK dalam Musrenbangdes kurang pro-aktif dalam mengaspirasikan kepentingan dan kebutuhan kaum perempuan.</li> <li>▪ Pengetahuan dan kemampuan tentang konsep pemberdayaan dan keorganisasian masih lemah</li> </ul>
2.	Kuantitas calon dan mantan buruh migran perempuan sangat banyak dan potensial untuk dapat ikut membantu merumuskan perencanaan pembangunan di desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Buruh migran perempuan belum dilibatkan dalam Musrenbangdes</li> <li>▪ Belum ada kesadaran akan hak-hak buruh migran perempuan untuk ikut terlibat dalam perumusan program pembangunan desa</li> </ul>
3.	Terdapat semangat, potensi dan peran aktif untuk berpendapat dari calon dan mantan buruh migran perempuan dalam kegiatan FGD untuk berdialog	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum mendapat kesempatan dalam Musrenbangdes untuk ikut serta pada proses perumusan program pembangunan desa</li> <li>▪ Belum memiliki kekompakan yang solid dalam memperjuangkan aspirasi program pembangunan bagi buruh migran perempuan</li> </ul>

Faktor Eksternal		
No	Peluang ( <i>Opportunities</i> )	Ancaman ( <i>Threat</i> )
1.	Sudah terdapat peraturan dan mekanisme perencanaan pembangunan di tingkat desa yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum ada inisiatif dari pemerintah desa dalam memberikan kesempatan/melibatkan lebih besar bagi buruh migran perempuan dalam Musrenbangdes</li> </ul>
2.	Musrenbangdes diselenggarakan secara rutin setiap tahun dan ada alternatif melalui kegiatan Musyawarah Rencana Aksi (Musrena) BMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dominasinya kaum laki-laki dalam merumuskan program pembangunan pada kegiatan Musrenbangdes</li> <li>▪ Tranparansi dan akses informasi tentang penyelenggaraan Musrenbang desa</li> </ul>
Aspek Penilaian Hukum		
Faktor Internal		
No	Kekuatan ( <i>Strenght</i> )	Kelemahan ( <i>Weakness</i> )
1.	Semangat calon dan mantan buruh migran sangat potensial untuk memahami hak-hak dan kewajiban tentang hukum khususnya hukum perburuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Buruh migran perempuan tidak memiliki pengetahuan tentang hukum perburuhan</li> <li>▪ Buruh migran perempuan tidak memiliki kesadaran untuk mempelajari atau menuntut adanya sosialisasi tentang hukum perburuhan</li> </ul>
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Banyak mantan buruh migran perempuan yang telah berpengalaman mengenai masalah hukum, hak-hak, dan kewajiban perburuhan</li> <li>✓ Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang kasus-kasus yang menimpa buruh migran tentang pelanggaran hukum.</li> </ul>	Mantan buruh migran perempuan belum memiliki inisiatif untuk berbagi pengalamannya kepada calon buruh migran atau sesama mantan buruh migran di desa
Faktor Eksternal		
No	Peluang ( <i>Opportunities</i> )	Ancaman ( <i>Threat</i> )
1.	Sudah terdapat peraturan dan mekanisme mengenai hukum perburuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Banyak penyalur tenaga kerja yang masih kurang untuk memberikan pengetahuan hukum perburuhan.</li> <li>▪ PJTKI secara sengaja tidak memberikan sosialisasi/penyuluhan tentang hukum perburuhan</li> <li>▪ Buruh migran dan penyalur tenaga kerja lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi (profit motif) daripada keselamatan dirinya</li> </ul>

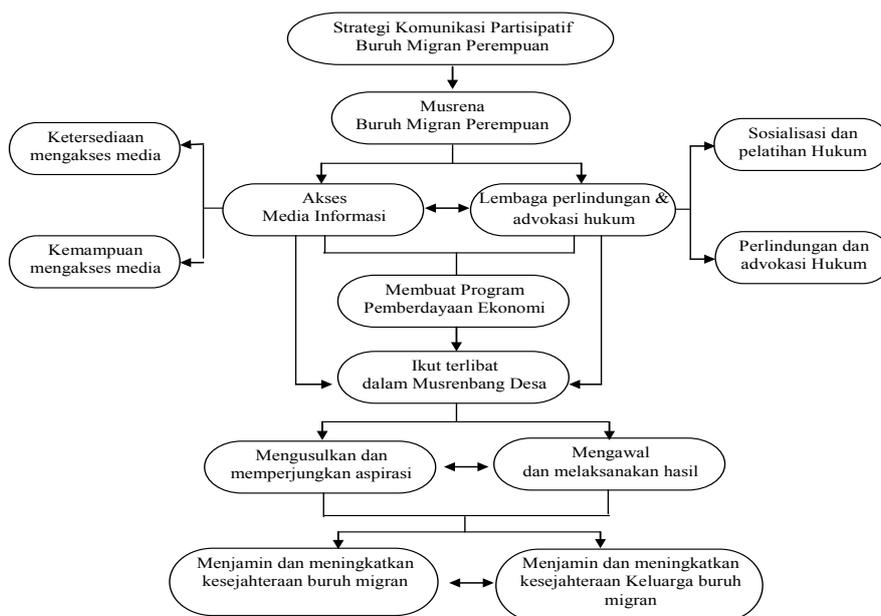
**4. Identifikasi kebutuhan Komunikasi**

Akses informasi para buruh migran perempuan masih sangat kurang dalam

mencari, memiliki dan menggunakan/memahami pentingnya informasi, ketentuan hukum perburuhan.

Penilaian terhadap informasi		
Faktor Internal		
No	Kekuatan ( <i>Strenght</i> )	Kelemahan ( <i>Weakness</i> )
1.	Ada keinginan untuk mencari informasi dan menggunakan media informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterbatasan menggunakan/mengakses informasi terutama internet</li> <li>▪ Daya beli yang masih kurang untuk memiliki/mengakses fasilitas media informasi internet</li> <li>▪ waktu untuk mengakses media sangat terbatas dan habis dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi/bekerja</li> </ul>
2.	Memiliki alat komunikasi berupa <i>handphone</i> dan tersedianya akses internet yang dapat digunakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>handphone</i> hanya dipergunakan untuk berkomunikasi antarpersonal</li> <li>▪ Keterbatasan kemampuan menggunakan dan mengakses media informasi terutama internet</li> </ul>
Faktor Eksternal		
No	Peluang ( <i>Opportunities</i> )	Ancaman ( <i>Threat</i> )
1	Banyak media informasi yang dapat diakses baik media cetak maupun media elektronik terutama internet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterbatasan media informasi baik media cetak maupun elektronik di pedesaan terutama akses internet</li> <li>▪ Masih dianggap mahal media informasi cetak maupun elektronik terutama internet</li> </ul>
2.	Banyak agen informasi atau komunikator pembangunan dari pemerintah, perguruan tinggi dan LSM/NGO yang bisa berperan dalam memberikan motivasi dan pelatihan "melek media" kepada buruh migran	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurang proaktifnya pihak pemerintah dan perguruan tinggi untuk memberikan akses dan media informasi bagi buruh migran perempuan</li> <li>▪ Belum maksimalnya peran disnaker dan depkominfo dalam menyediakan akses dan media informasi serta pelatihan akses internet</li> </ul>

### 5. Strategi Komunikasi Partisipatif Buruh Migran Perempuan



Gambar 3. Strategi Komunikasi Partisipatif

## **Simpulan**

- (1) Model komunikasi pembangunan partisipatif dalam konsep Musrena bagi calon dan mantan buruh migran sebagai media komunikasi untuk merumuskan dan menghasilkan program pemberdayaan yang akan diaspirasikan serta diperjuangkan dalam proses Musrenbang di Tingkat Desa. Proses pemodelan komunikasi partisipatif melalui: (i) Pemantapan hubungan; (ii) Bekerjasama dengan masyarakat; (iii) Identifikasi keragaman masyarakat; (iv) Identifikasi kebutuhan komunikasi.
- (2) Pemantapan hubungan dalam penelitian juga dapat dikatakan berhasil ketika peserta FGD secara aktif berdialog dengan menyampaikan pengalaman dan pendapatnya ketika pembahasan yang dipandu peneliti tentang akses informasi perburuhan, aspek partisipasi buruh migran, penilai bidang hukum yang selama ini diketahui dan dirasakan oleh buruh migran, serta bidang usaha ekonomi yang dimiliki dan diinginkan oleh buruh migran atau mantan buruh migran.
- (3) Fase bekerjasama dengan masyarakat dapat dilaksanakan dan ditentukan oleh proses pemantapan hubungan atau pembukaan akses terlebih dahulu. Sehingga peserta atau subjek penelitian dapat secara terbuka dan akrab melakukan dialog dengan peneliti. Hasilnya akhirnya dapat menyadari pentingnya Musyawarah Rencana Aksi (Musrena) bagi perempuan buruh migran dalam mengaspirasikan dan terlibat merencanakan/membuat program pembangunan
- (4) Keberagaman buruh migran dalam aspek partisipasi masih banyak yang belum mengetahui tentang Musrenbangdes, hanya melibatkan perempuan dari pengurus PKK dan belum ada kesadaran. Aspek pengetahuan hukum, Buruh migran perempuan tidak memiliki pengetahuan tentang hukum perburuhan Buruh migran perempuan tidak memiliki kesadaran untuk mempelajari atau menuntut adanya sosialisasi tentang hukum perburuhan karena fokus pada orientasi pemenuhan kebutuhan untuk mendapat penghasilan. Aspek pemberdayaan ekonomi, buruh migran perempuan kurang mendapat kesempatan untuk dilatih/diberdayakan tentang usaha ekonomi, buruh migran perempuan tidak memiliki modal usaha yang cukup, karena habis untuk kebutuhan keluarga dan sang sodara, dan tidak memiliki perencanaan jangka panjang dalam menentukan masa depan.
- (5) Inisiatif dan kemauan untuk mengakses informasi para buruh migran perempuan masih sangat kurang dalam mencari, memiliki dan menggunakan/memahami pentingnya informasi, ketentuan hukum perburuhan.

### Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Bloor,, M and Wood, F. 2006. *Keywords in Qualitative Methods A Vocabulary of Research Concepts*. London, Thousand Oaks, New Delhi : Sage Publications
- Daniel M., Darmawati., dan Niieldalina. 2008. *Participatory Rural Appraisal (PRA) : Pendekatan Efektif Mendukung Penerapan Penyuluhan Partisipatif dalam Upaya Percepatan Pembangunan Pertanian*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nursiti dan Susana E. 2011. Kontribusi Musrena terhadap Pengarusutamaan Gender dan Anggaran Responsif Gender di Kota Banda Aceh. Di dalam Mahdi *et al. Membangun Kota Berbasis Gampong: Tinjauan terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Banda Aceh*. [Laporan Hasil Penelitian]. Kerjasama Program Riset, Pendampingan, dan Advokasi Pemerintah Kota Banda Aceh, Indonesia Pemerintah Kota Apeldoorn, Belanda Aceh Institute - Cordaid
- Subianto, A. 2006. Pengaruh Pemanfaatan Remitan Buruh Migran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Cilacap (Studi Kasus di Kecamatan Adipala, Kecamatan Binangun dan Kecamatan Nusawungu). [Tesis]. Pascasarjana Universitas Diponegoro
- Sutaat, Setiti SG., Widodo N., dan Unayah, N. 2011. *Pendampingan Sosial Bagi Calon Pekerja Migran dan Keluarganya di Daerah Asal*. Nitimihardjo C, editor. Jakarta : P3KS Press
- Syahyuti. 2006. *Tiga Puluh Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*, Jakarta : Bina Rena Pariwisata.
- Wulan, TR. 2010. Pengetahuan dan Kekuasaan : Penguatan Remitan Sosial sebagai Strategi Pemberdayaan Buruh Migran Perempuan. [Disertasi]. Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
- Sumber lain**
- [BNP2TKI]. Data Migran Se-Indonesia. [internet]. [diunduh 16 November 2013]. Tersedia pada : <http://www.bnp2tki.go.id>
- [Buruh Migran]. Perlindungan dari hulu”. [internet]. [diunduh 15 November 2013]. Tersedia pada : <http://buruhmigran.or.id>
- [DPR]. “Refleksi 2012, Perlindungan Buruh Migran Minim”. [internet].

[diunduh 15 November 2013]. Tersedia pada : <http://www.dpr.go.id>

[Harian Terbit]. Musrena Andalan Banda Aceh. [internet]. [diunduh 16 November 2013]. Tersedia pada : <http://www.harianterbit.com>

[Polhukam]. DPRD Cilacap Fokus Bahas

Raperda Perlindungan Buruh Migran. [internet]. [diunduh 16 November 2013]. Tersedia pada : <http://polhukam.rmol.co/read>

[Tempo Surat Kabar]. Buruh Migran Asal Cilacap Menurun 50%. [internet]. [diunduh 16 November 2013]. Tersedia pada : <http://www.tempo.co>